

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Frafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni.
- Ahmad Ali. 2011. *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* Jakarta:Kencana Prenada Media Grup.
- Alvon Kurnia Palma (etc). 2014. *Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Andi Hamzah. 2014. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Zainal Abidin Farid. 1993. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Amrani, Hanafi. 2019. *Politik Pembaruan Hukum Pidana, (Selayang Pandang Mengenai Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- Andre Ata. 2001. *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik Jhon Rawls*, Yogyakarta: Kanisius.
- Aswanto. 2012. *Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum Politik dan Pemilu*. Yogyakarta:Rangkang Education.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2019, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019*.Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

- Bambang Sugeng Rukmono, 2024, *Perkembangan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia*.
- \_\_\_\_\_, 2024, *Superioritas Delik Korupsi*. Semarang:UNS Press.
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*. Semarang:Badan Penerbit Magister.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung:Citra Aditya Bakti. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Chairul Huda. 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana: Jakarta.
- Didik Endro Purwoleksono. 2015. *Hukum Acara Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Eddy O.S Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- \_\_\_\_\_, Topo Santoso. 2025. *Anotasi KUHP Nasional*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Faizal Kurniawan. 2025. *Doktrin Unjust Enrichment Karakteristik dan Penerapannya dalam Tuntutan Ganti Rugi*. Jakarta: Kencana.
- Frieda Husni Hasbullah. 2002. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan*, Ind-Hill-Co: Jakarta.
- H. Salim. 2010. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta:Rajawali Pers.
- H.R Otje Salman S, Eddy Damian. 2002. *Beberapa Catatan Editor dalam Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung:Alumni dan Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum, dan Pembangunan.

- Hans Kelsen. 1945. *General Theory of Law and State*, New York: Russel & Russel.
- Irwansyah. 2024. *Penelitian Hukum : Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Yogyakarta: Mirra Media Buana.
- Jazim Hamidi (et.al). 2013. *Membedah teori-teori hukum kontemporer*, Malang: Univeristas Brawijaya Press.
- Jeremy Bentham. 2024. *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Hukum Perdata dan Hukum Pidana* terjemahan asli *The theory of Legislation*, Bandung : Nuansa Cendekia.
- Jimly Asshiddiqie, Safa"at, M. Ali. 2006. *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, Jakarta: Sekretariat Jendrereral & Kepaniteraan Makamah Konstitusi RI.
- John Rawls. 1999. *A Theory of Justice*. (New York: The President and Fellowship of Harvard University Press.
- \_\_\_\_\_. 1971. *A theory of Justice*. London: Oxford University Press
- Lawrence M. Friedman. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation.
- Lilik Mulyadi. 2015. *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime* Bandung: Alumni.
- Lindy Muzila (et.al). 2012. *On the Take Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption*. Washington DC: International Bank for Reconstruction and Development The World Bank.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M Yahya Harahap. 2001. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Cet. 2*, Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Maria Farida Indrati. 2016. *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Jakarta:Kanisius.
- Marwan Effendy. 2005. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. PT. Gramedia Pustaka Utama:Jakarta.
- Muhadar (etc). 2024. *Perampasan Aset Hasil Kejahatan Menurut Hukum Pidana Ekonomi, Korupsi, dan Pencucian Uang Suatu Studi Komparatif*. Yogyakarta: KBM Indonesia.
- Mulyadi L. 2007. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis,Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni.
- Muhammad Tahir Azhary. 2012. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Mochtar Kusumaatmadja, Arief Sidharta. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Buku 1: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Hukum*. Bandung:Alumni.
- \_\_\_\_\_.2006.*Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung:Alumni.
- \_\_\_\_\_.1972, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung:Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi FH Unpad.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana (Cet.9)*, Jakarta : Rieneki Cipta.
- Nandan Sambas. 2019. *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP*. Bandung:PT Refikan Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Grup.
- Pujiyono. 2007. *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Richard A. Leo. 2008. *Police Interrogation and American Justice*. England: Harvard University Press.
- Romli Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Ruslan Renggong. 2019. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Satjipto Rahardjo. 2008. *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Press.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Hukum dan Perilaku Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Shidarta (et.al). 2012. *Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan*, Jakarta:Epistema Institute.
- Soehino. 1980. *Ilmu Negara*. Yogyakarta:Liberty.
- Soerjono Soekanto, Purnadi Purbacaraka. 1986. *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung:PT.Citra Aditya Bakri.
- Subekti. 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermedia: Jakarta.
- Sudarto. 2018. *Hukum Pidana 1 edisi revisi*. Semarang:Yayasan Sudarto.
- \_\_\_\_\_. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru
- Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*, Depok:Rajagrafindo Persada.
- Theo Hujibers. 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta:Kanisius.
- Topo Santoso. 2024. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- United Nation Office on Drugs and Crime. 2014. *The Italian Experience in the Management, Use, and Dsiposal of Frozen, seized and Confiscated Assets:Open-Ended Intergovernmental Working Group on Asset Recovery*, Vienna.
- Uzair Fauzan, Heru Prasetyo. 2006. *Teori Keadilan*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Wrijono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

\_\_\_\_\_. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco.

Zainal Airifn Mochtar, Eddy O.S Hiariej. 2024. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Memahami Teori, Kaidah, Asas, dan Filsafat Hukum)*. Depok: Raja Grafindo Persada

Zainal Asikin Amiruddin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

### **Artikel Jurnal**

Abiodun Ashiru. 2021. Criminalisation Of Illicit Enrichment And The Right To Presumption Of Innocence In Nigeria: Finding A Balancing Ground From A Comparative Lens. *Jurnal Ezenwohaetorc*.

Akhmad, Zico Junius. Papontee Teeraphan. 2023. *Unmasking Illicit Enrichment : A Comparative Analysis of Wealth Acquisition Under Indonesian, Thailand, and Islamic Law*. *Jurnal Indonesia Legal Studies* Vol 8 Nomor 2.

Aleksandar Stevanovic, Laura Maria Stanila. 2021 *Illicit Enrichment as a Criminal Offense: Possibility of Implementation in the National Criminal Legislation*, Institucije I Prevencija Finansijskog Kriminaliteta, Serbia.

Andrew Donrbierer. 2021. *licit Enrichment: A Guide to Laws Targeting Unexplained Wealth*. Basel: Basel Institute on Governance.

Azyumardi Azra. 2002. *Korupsi Dalam Perspektif Good Governance*, *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 2, no. 1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Bambang Waluyo. 2011. *Menyoal Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, *Jurnal Bina Adhyaksa* Vol II. No.11.

Barda Nawawi Arief. *Kebijakan kriminal (criminal policy)*. Bahan Penataran Kriminologi Bandung: FH Universitas Katolik Parahyangan.

Craig Fagan. 2012. *Illicit Enrichment Regulations*. France: Transparency International.

- Dwi Siska Susanti, 2022, *Laporan Kegiatan : PECB Virtual Anti-Birbery Confrence 2022 "Illicit Enrichment Laws: How Succesful are they in Combating Corruption"*.
- Eddy Mulyadi Soepardi. 2010. *Peran BPKP Dalam Penanganan Kasus Berindikasi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Konsultasi Instansi Pemerintah*, Seminar Nasional Permasalahan Hukum Pada Pelaksanaan Kontrak Jasa Konsultansi dan Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Instansi Pemerintah, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan INKINDO.
- Eddy O.S Hiariej. 2018. *United Nation Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Elilah Dalilah, Vishnu Juwono. 2021. Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN: Dimensi Program Marsh & McConnel, Jurnal INETGRITAS : Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Haryadi. 2014. *Tinjauan Yuridis Perumusan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Ilmu Hukum.
- Jose Miguel Alvarez dan Jessica Ramos, 2019, *Guide to Legal Research in Honduras*. Jurnal Global Lex New York Univesity School of Law.
- Mesicic, 2022, *Follow Up Mechanism for the Implementation of The Inter-American Convention Against Corruption, Thirty-Seventh Meeting of the Committee of Experts*: Washington DC.
- Mohammad Ridwan Saripi. 2016. Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum Unsrat Vol. 22 No. 7.
- Muh Ibnu Fajar Rahim. 2023. *Asas-Asas Hukum Penuntutan*, Jurnal The Prosecutor Law Review Volume 1, No. 1, April 2023.
- Ramsen Marpaung, Tristan Pascal Moeliono, 2021, *Perbandingan Hukum antara prinsip Habeas Corpus dalam sistem hukum Pidana Inggris dengan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Wawasan Yuridika Vol.5 No.2.

Sandun Yapa, Baishun Yuan. 2022. Rethinking the Criminalization of Illicit Enrichment in Combating Corruption in the Public Sector, *International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS)* Volume VI, Issue XI.

Satuan Tugas Pemeberantasan *Mafia Hukum*, 2009, *Illicit Enrichment: Kriminalisasi Peningkatan Kekayaan yang Tidak Wajar*.

Siska Trisia, 2020, *Pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Tataran Internasional*, MAPPI FHUI Universitas Indonesia.

Sunaryo. 2022. *Konsep Fairness Jhon Rawls, Kritik dan Relevansinya*, Jakarta : Jurnal Konstitusi Mahkamah Konsitusi Volume 19 No.1.

Vito Tanzi.1998. *Corruption Around The World : Causes, Consequence, Scope, and Cures*, International Monetary Found (IMF) Working Paper.

### **Tesis dan Disertasi**

A.Hamid S. Attamimi. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan negara (suatu studi analisis mengenai keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu PELITA I – PELITA IV*, Jakarta: Disertasi Doktor Universitas Indonesia.

A.A Mirah Endraswari, 2016. *Penerapan Beban Pembuktian Terbalik dalam Perampasan Illicit Enrichment Kaitannya dengan HAM*. Tesis. Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana.

Rif'atul Husniah. 2017. *Illicit Enrichment* sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Tesis. Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kejaksaan RI

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

### **Sumber Internet**

<https://kbbi.web.id/korupsi>

<https://kbbi.web.id/bijak>

<https://thelawdictionary.org/corruption/>

<https://www.merriam-webster.com/thesaurus/illicit>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Achmad\\_Ali](https://id.wikipedia.org/wiki/Achmad_Ali)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Majapahit>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Mochtar\\_Kusumaatmadja](https://id.wikipedia.org/wiki/Mochtar_Kusumaatmadja)

<https://doi.org/10.31078/jk1911>

<https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.861>

<https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/30/Corruption-Around-the-World-Causes-Consequences-Scope-and-Cures-2583>

<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/43968>

<https://ugm.ac.id/id/berita/8043-uang-negara-hilang-rp-250-triliun-akibat-korupsi>

<http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Pengaturan-Tindak-Pidana-Korupsi-dalam-Tataran-Internasional.pdf>

<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/19301891/data-icw-2020-kerugian-negara-rp-567-triliun-uang-pengganti-dari-koruptor-rp>

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/10/14/kenakan-pasal-kerugian-negara-icw-sebut-kejaksanaan-lebih-unggul-dari-kpk>

<https://www.nyulawglobal.org/globalex/Honduras.html>

<https://oxcon.ouplaw.com/display/10.1093/law-mpeccol/law-mpeccol-e200>

<https://www.tsc.gob.hn/biblioteca/index.php/leyes/177-constitucion-de-la-republica-de-honduras>

[https://www.tsc.gob.hn/web/leyes/Decreto\\_130-2017.pdf](https://www.tsc.gob.hn/web/leyes/Decreto_130-2017.pdf)

[https://www.tsc.gob.hn/web/ley\\_tsc/Ley\\_Organica\\_TSC.pdf](https://www.tsc.gob.hn/web/ley_tsc/Ley_Organica_TSC.pdf)

<https://rsisinternational.org/journals/ijriss/Digital-Library/volume-6-issue-11/557-574.pdf>

[https://star.worldbank.org/sites/default/files/202106/Illicit\\_Enrichment\\_Main-Text-PDF-pages.pdf](https://star.worldbank.org/sites/default/files/202106/Illicit_Enrichment_Main-Text-PDF-pages.pdf)

<https://sustain.id/2022/03/23/laporan-kegiatan-pecb-virtual-anti-bribery-conference-2022-illicit-enrichment-laws-how-successful-are-they-in-combating-corruption/>

[https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/Italy\\_Report\\_Final.pdf](https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/Italy_Report_Final.pdf)

[https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/helpdesk/Helpdesk\\_answer\\_illicit\\_enrichment.pdf](https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/helpdesk/Helpdesk_answer_illicit_enrichment.pdf)

[http://www.oas.org/en/sla/dlc/mesicic/docs/mesicic6\\_hnd\\_informe\\_ing.pdf](http://www.oas.org/en/sla/dlc/mesicic/docs/mesicic6_hnd_informe_ing.pdf)